

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batu sebagai salah satu kota yang banyak berkembang pada sektor pariwisata dan pertanian/agrowisata memberikan dampak besar pada perkembangan sektor-sektor pelayanan pemerintah Kota Batu. Salah satu sektor pelayanan Pemerintah Kota Batu adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendukung perkembangan Kota Wisata memberikan peran yang besar pada urusan perumahan dan permukiman, pekerjaan umum (ke-Cipta Karya-an), serta urusan pertanahan dan pemakaman.

Penyusunan Rencana Strategis pada masing-masing organisasi perangkat daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dimana perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama para pemangku kepentingan berdasarkan kewenangan masing-masing serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki setiap daerah sesuai dinamika perkembangan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) khususnya Rencana Strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, merupakan tindak lanjut dari visi, misi, program dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2017 s/d 2022. Hal ini adalah salah satu implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu adalah satu kesatuan yang utuh dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu, untuk periode 5 (lima) tahun.

Selain itu, Renstra SKPD juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu sesuai dengan tugas pokok fungsinya yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor : 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.

Penyusunan Renstra 2017–2022 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017–2022. Susunan Renstra 2017–2022 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan/permukiman; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman; serta program dan kegiatan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi masing-masing bidang dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

1.2 Landasan Hukum

Regulasi yang menjadi landasan hukum dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010 – 2030;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu 2017-2022;
13. Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.
2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu (Perumahan dan Permukiman, Ke-Cipta Karya-an, Pertanahan dan Pemakaman).
3. Memberikan gambaran Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu untuk mencapai target pelayanan sampai dengan tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu Tahun 2017 – 2022 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi Jawa Timur
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. pelayanan, hubungan masyarakat dan publikasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas Bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dinas;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- l. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan dan

Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program bidang perumahan dan permukiman;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang perumahan dan permukiman;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang perumahan, permukiman dan pengawasan;
- d. pengendalian data informasi bidang perumahan, permukiman dan pengawasan;
- e. perumusan kebijakan teknis perumahan, permukiman dan pengawasan;
- f. pemberian rekomendasi ijin terkait pembangunan serta pengembangan perumahan dan permukiman;
- g. perumusan kebijakan kerja sama dan koordinasi dengan badan atau lembaga keuangan;
- h. perumusan kebijakan teknis pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan serta permukiman;
- i. perumusan kebijakan teknis pengawasan kawasan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan perumahan serta pemukiman;
- k. perumusan kebijakan teknis pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami);
- l. pelaksanaan fasilitasi dan rehabilitasi penyediaan rumah korban bencana atau relokasi program Pemerintah Kota;
- m. pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan dan permukiman; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan

di bidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih, dan sanitasi lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program bidang permukiman;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang cipta karya;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih dan sanitasi lingkungan;
- d. pengendalian data informasi bidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih dan sanitasi lingkungan;
- e. perumusan kebijakan teknis penataan bangunan gedung pemerintah;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan termasuk gedung dan rumah negara;
- g. pelaksanaan rekomendasi ijin prinsip tata ruang dan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung, serta ijin penyehatan lingkungan;
- h. pembinaan dan koordinasi pengembangan sarana prasarana infrastruktur permukiman;
- i. pembinaan dan koordinasi penggunaan sarana prasarana air bersih serta penyehatan lingkungan;
- j. pembinaan dan koordinasi sarana prasarana air bersih, sampah dan air limbah;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemanfaatan lahan, sarana, dan prasarana TPS dan TPA;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang permukiman; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.5 Tugas dan Fungsi Bidang Pertanahan dan Pemakaman

Bidang Pertanahan dan Pemakaman mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah.

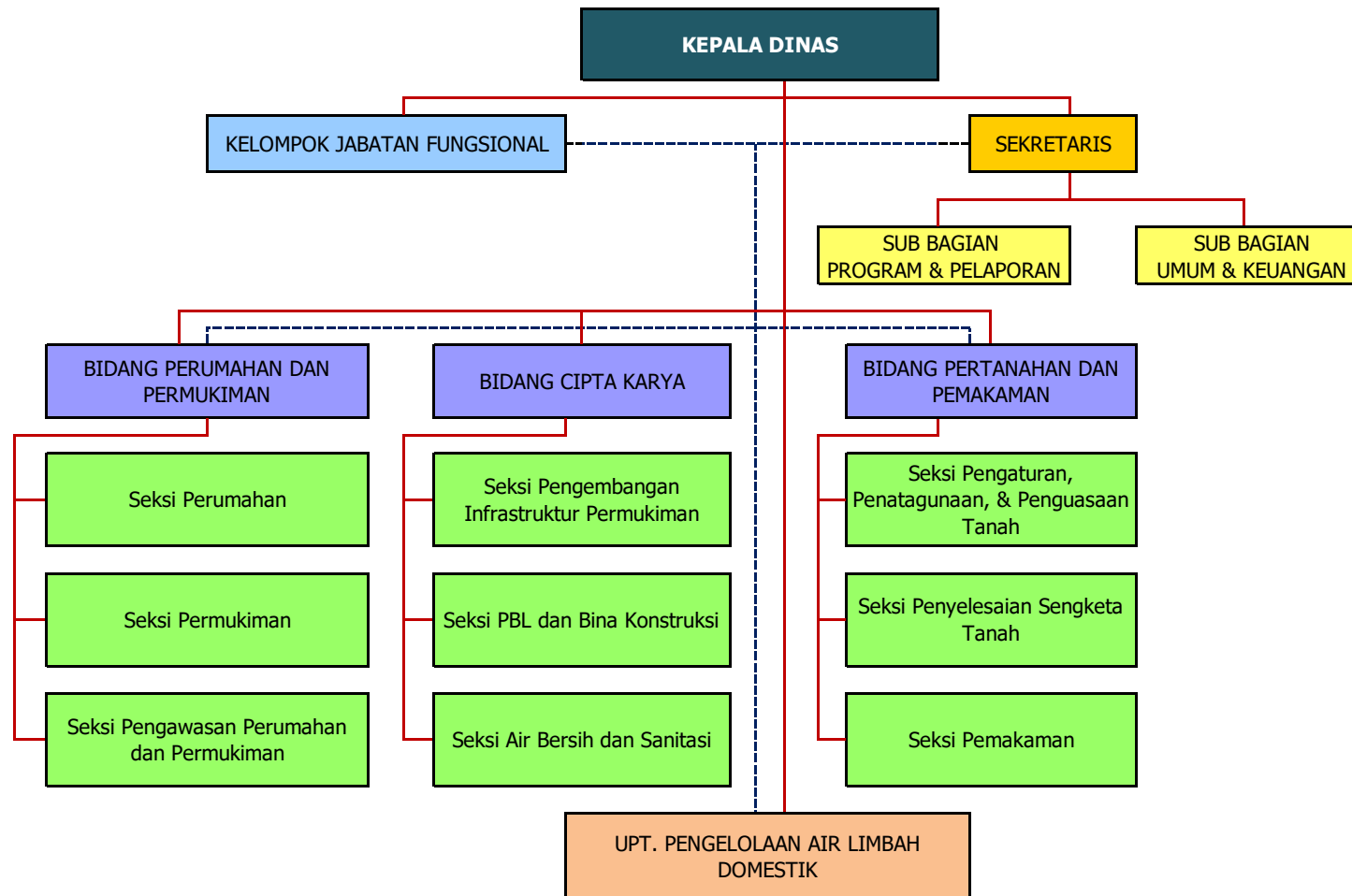
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program bidang pertanahan;
- b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pertanahan;
- c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- d. pengendalian data informasi bidang pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- e. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;
- f. perumusan kebijakan teknis kerja sama pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah.;
- g. perumusan kebijakan penyelenggaraan program daerah agraria (PRODA) dan program nasional agraria (PRONA);
- h. pemberian rekomendasi izin terkait pemanfaatan tata guna tanah;
- i. perumusan kebijakan pengelolaan pemakaman;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pertanahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Data Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu didukung oleh unsur-unsur pegawai sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (data per Oktober 2017)

Jumlah Pegawai Berdasarkan	PNS				Non PNS		THL	
		52				10		14
Jenis Kelamin	Laki-laki				Perempuan			
	55				21			
Pendidikan	SD	SMP	SMU	D1	D3	S1	S2	S3
	3	3	19	0	6	35	10	0
Golongan	I		II		III		IV	
	0		17		31		4	
Eselon	II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	Staf	
	0	0	1	3	12	1	35	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Batu, 2017

2.2.2 Data Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan didukung sarana dan prasarana antara lain sebagai berikut :

a. Peralatan Kantor

Daftar peralatan kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana berikut :

Tabel 2. Peralatan Kantor pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017

No	Jenis Peralatan	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Komputer/PC	2007 – 2009	13 unit	
		2012	1 unit	
		2013	6 unit	
		2014	1 unit	
		2015	3 unit	
		2016	6 unit	

No	Jenis Peralatan	Tahun Pengadaan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
2	Laptop	2007 – 2009	6 unit	
		2016	5 unit	
3	Printer	2009	5 unit	1 Baik, 4 Rusak
		2011	3 unit	1 Baik, 2 Rusak
		2013	12 unit	7 Baik, 5 Rusak
		2014	12 unit	11 Baik, 1 Rusak
		2015	5 unit	
		2016	14 unit	
4	Kamera Digital	2009	2 unit	
		2016	4 unit	
5	Handy Talkie	2009	4 unit	
		2016	10 unit	
6	Meteran Pendek	2009	4 unit	
7	Plotter	2009	1 unit	Rusak
8	Disto meter	2009	1 unit	
		2016	1 unit	
9	Coer Cutter	2009	1 unit	
10	Cement Sampler	2009	1 unit	
11	Slump test Aparatus	2009	1 unit	
12	Meteran Roda	2009	1 unit	
13	Sketmat (jangka) Digital	2009	1 unit	
14	Sketmat Manual	2009	1 unit	
15	Concrete Test Hammer	2009	1 unit	
16	GPS	2009	3 unit	
		2016	1 unit	
17	Theodolit	2016	1 unit	
18	Modem	2016	2 unit	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, 2017

b. Kendaraan

Daftar kendaraan dinas (Roda 4 dan Roda 2) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Kendaraan Dinas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017

No	Merk	Type	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Keterangan
1	Supra X	NF 100D	2002	N 2164 KP	Sekretariat
2	Yamaha Jupiter	5 LM 102 CC	2004	N 2461 KP	UPT. PALD
3	Honda	NF 100 SLD	2006	N 2092 KP	Sekretariat
4	Suzuki Smash	FK 110 SCD K6	2007	N 2143 KP	Sekretariat
5	Suzuki Smash	FK 110 SCD K6	2007	N 2144 KP	Bid. Perumahan
6	Suzuki Smash	FK 110 SCD K6	2007	N 2145 KP	Bid. Pertanahan
7	Suzuki Smash	FK 110 SCD K6	2007	N 2146 KP	Bid. Cipta Karya
8	Suzuki New Smash	FK 110 SCD K6	2008	N 2312 KP	Sekretariat
9	Suzuki New Smash	FK 110 SCD K6	2008	N 2313 KP	Sekretariat
10	Honda Mega Pro	GL 160 D	2009	N 2541 KP	Bid. Perumahan
11	Yamaha Vixion	2TP	2016	N 2709 KP	Bid. Cipta Karya

No	Merk	Type	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Keterangan
12	Yamaha Vixion	2TP	2016	N 2710 KP	Bid. Pertanahan
13	Honda Vario 150	K1H02N14L0 AT	2016	N 2711KP	Bid. Perumahan
14	Honda Vario 150	K1H02N14L0 AT	2016	N 2712 KP	Bid. Pertanahan
15	Honda Vario 150	K1H02N14L0 AT	2016	N 2713 KP	Sekretariat
16	Honda Vario 150	K1H02N14L0 AT	2016	N 2714 KP	Sekretariat
17	Kawasaki LX 150G	LG150G	2016	N 2717 KP	Bid. Cipta Karya
18	Kawasaki LX 150G	LG150G	2016	N 2718 KP	Bid. Cipta Karya
19	Honda Supra Fit	NF11B2D1 M/T	2013	L 5484 KP	UPT. PALD
20	Suzuki	ERTIGA	2014	N 611 KP	Sekretariat
21	Isuzu Panther	PICK UP	2014	N 8048 KP	Bid. Cipta Karya
22	Hino	WU342 HKMTJD3	2015	B 9200 SMA	UPT. PALD
23	Hino	WU342 HKMTJD3	2016	N 8093 KP	UPT. PALD

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, 2017

2.2.3 Data Penerimaan

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu, penerimaan yang diterima melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 2013 sampai dengan 2016 dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Target dan Realisasi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun 2013 s/d 2017

No.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2013	50.000.000	50.212.500	100,43%
2	2014	50.000.000	53.822.000	107,64%
3	2015	50.000.000	27.177.500	54,36%
4	2016	30.000.000	37.900.000	126,33%
5	2017	30.000.000	37.391.000	124,63%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun perencanaan pada tahun 2012 – 2017 terjadi perubahan-perubahan nomenklatur pada satuan perangkat daerah. Dalam melaksanakan urusan pelayanan, pada tahun 2012 sebagaimana Peraturan Daerah

nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengampu urusan wajib bidang Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Urusan Perumahan. Pada tahun 2014, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berubah nomenklatur menjadi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang. Sedangkan urusan Perumahan diampu oleh Dinas Perumahan berdasarkan Peraturan Walikota nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Kota Batu.

Dengan terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perubahan nomenklatur dinas/perangkat daerah Kota Batu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, sebagian urusan yang diampu Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengampu 2 (dua) urusan wajib yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan serta 1 (satu) urusan pilihan yaitu Urusan Pertanahan. Berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, jenis pelayanan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

a. Pelayanan Bidang Cipta Karya

Sebagai pelaksana kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum di bidang ke-cipta karya-an, pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan sebagian besar berkaitan dengan pelayanan akses infrastruktur dasar masyarakat. Pemenuhan infrastruktur dasar sebagaimana program nasional untuk pencapaian *Universal Access* 100 – 0 – 100 (100% akses air bersih, 0% permukiman kumuh, 100% akses sanitasi layak), didukung bidang Cipta Karya pada sektor pelayanan akses air bersih dan pelayanan sanitasi khususnya akses penanganan air limbah.

- *Pelayanan akses Air Bersih/Air Minum*

Pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan dengan upaya penyediaan air bersih/air minum di masyarakat dengan mengutamakan penyediaan air minum oleh lembaga pengelola air minum di masyarakat perdesaan (HIPPAM/Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum). Upaya ini

dilakukan dengan pembangunan sarana prasarana yang diperlukan ataupun dengan pengembangan sarana yang sudah ada serta pembinaan kepada organisasi masyarakat pengelola air bersih/air minum (HIPPAM).

- *Penyehatan Lingkungan Permukiman*

Pelayanan penyehatan lingkungan permukiman berkaitan dengan pengelolaan air limbah permukiman oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya dilakukan dengan penyediaan sarana pengolahan limbah, baik yang berskala komunitas (IPAL Komunal) maupun skala kawasan dan juga drainase lingkungan permukiman. Dengan penyediaan sistem air limbah secara komunal dan drainase lingkungan permukiman, diharapkan dapat memperbaiki sistem sanitasi permukiman.

Selain pelayanan yang berkaitan dengan program nasional, bidang cipta karya juga bertugas dalam penyediaan infrastruktur kota (pasar, terminal, gedung kantor, gedung olah raga dan sebagainya) dan infrastruktur kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase permukiman).

b. Pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh bidang Perumahan dan Permukiman adalah kegiatan pada Urusan Perumahan yang berkaitan dengan penyediaan terhadap akses perumahan yang layak. Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan sebagian besar berkaitan dengan upaya penyediaan rumah layak huni, misal kegiatan bedah rumah (rehabilitasi rumah tidak layak huni).

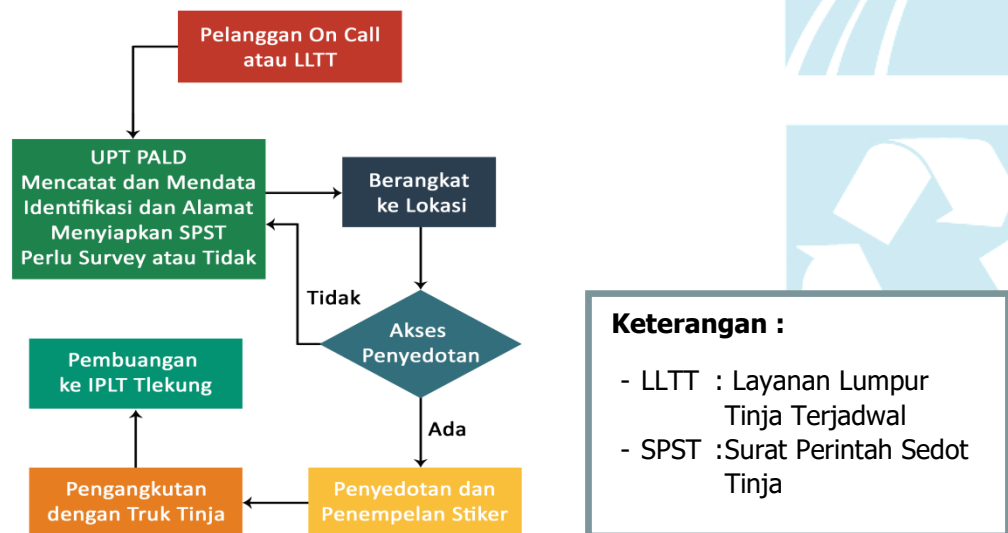
c. Pelayanan Bidang Pertanahan dan Pemakaman

Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Bidang Pertanahan dan Pemakaman antara lain berupa proses fasilitasi untuk program agraria daerah (Proda) untuk peningkatan capaian lahan bersertifikat dan juga layanan ijin pemakaman dan pengabuan mayat. Untuk pelaksanaan Proda, bidang Pertanahan dan Pemakaman bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga resmi yang berwenang dalam penerbitan sertifikat tanah. Berkaitan dengan terwujudnya pelayanan ijin pemakaman dan pengabuan mayat bagi masyarakat yang membutuhkan dengan baik dan cepat serta terpeliharanya lahan pemakaman yang sudah ada. Pelayanan ijin pemakaman dan pengabuan mayat dilakukan dengan prosedur sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Prosedur Permohonan Pengajuan Sertifikat Pemakaman

d. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Domestik UPT. Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan perpanjangan tangan bidang Cipta Karya sebagai unsur teknis yang melaksanakan pelayanan penyehatan lingkungan permukiman di sektor sanitasi (pengelolaan air limbah, khususnya air limbah domestik). Kegiatan yang dilaksanakan dan dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat adalah pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pengolahannya pada Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Prosedur yang ditetapkan dalam proses pelayanan tersebut sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.

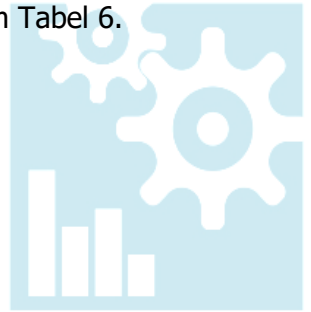


Keterangan :

- LLTT : Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
- SPST : Surat Perintah Sedot Tinja

Gambar 3. Proses Pelayanan Pengurusan Sedot Tinja Terjadwal dan Tidak Terjadwal

Pencapaian Kinerja layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama 5 (lima) tahun ke belakang berdasarkan indikator digambarkan dalam Tabel 5 dan berdasarkan realisasi anggaran digambarkan dalam Tabel 6.



Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

No.	Indikator Kinerja (berdasarkan SPM)	Target Renstra tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	1,52	1,8	1,98	2,15	2,32		2,8	2,79	2,74			156	141	127		Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	95	95,25	95,5	95,75	96			98,25	98,49	99,08			103	102,8	103,2	
3	Persentase penduduk berakses air minum	67,5	69	70,50	72	73		85	84,03	83,04	82		123,2	119,2	115,3	112,3	
4	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi	59,76	63,36	66,92	70,52	74,12		81	84,84	85,83	85,16		127,8	126,8	121,7	114,9	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, 2017

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

Uraian Program (1)	Anggaran pada tahun (000)					Realisasi Anggaran pada tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2013 (7)	2014 (8)	2015 (9)	2016 (10)	2017 (11)	2013 (12)	2014 (13)	2015 (14)	2016 (15)	2017 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.002.885,7	7.496.655,5	9.248.653,7	11.626.063,0	850.674,0	5.753.780,4	6.854.601,4	8.854.533,7	10.262.276,2	648.394,0	95,85	91,44	95,74	88,27	76,22	3,76	3,66
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.396.740,0	79.461.434,5	159.168.216,8	7.173.718,3	15.255.623,6	5.290.417,2	32.138.679,9	156.998.352,0	6.463.667,0	12.349.958,4	71,52	40,45	98,64	90,10	80,95	13,32	11,48
Peningkatan Disiplin Aparatur	123.400,0	74.275,0	216.750,0	198.000,0	16.000,0	120.980,0	73.650,0	199.369,5	103.862,0	15.948,0	98,04	99,16	91,98	52,46	99,68	4,45	3,88
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	14.250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	137.500,0	215.800,0	145.628,9	150.000,0	-	59.040,0	60.347,7	30.597,5	77.080,0	-	42,94	27,96	21,01	51,39	-	3,27	4,05
Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.115.941,0	1.868.017,0	1.378.932,0	2.665.860,0	195.000,0	1.938.929,0	1.597.775,0	1.166.297,1	2.030.046,6	183.308,0	91,63	85,53	84,58	76,15	94,00	3,57	3,32
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	1.484.178,0	1.926.412,0	1.893.979,0	3.687.389,4	1.271.889,4	1.418.157,0	1.610.813,1	1.748.452,1	2.916.854,3	1.147.275,1	95,55	83,62	92,32	79,10	90,20	4,31	3,99
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.866.350,0	8.505.278,0	4.847.638,2	7.984.559,6	15.866.721,6	118.806,8	4.797.129,4	4.384.839,5	6.735.754,1	12.799.578,0	4,14	56,40	90,45	84,36	80,67	5,68	43,30
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	8.188.425,0	1.077.540,0	5.172.365,0	2.755.000,0	1.247.000,0	7.694.418,7	1.029.383,6	5.023.916,6	2.604.132,6	1.234.620,5	93,97	95,53	97,13	94,52	99,01	5,58	5,65
Pengembangan PJU dan Keindahan Kota*	4.018.630,0	6.351.185,0	6.756.560,0	12.652.030,4	-	3.662.171,0	5.973.107,3	6.564.799,8	11.781.360,0	-	91,13	94,05	97,16	93,12	-	4,52	4,52
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran*	323.421,0	533.338,8	262.188,8	81.064,4	-	304.925,9	509.165,8	256.188,0	81.050,8	-	94,28	95,47	97,71	99,98	-	2,45	2,49
Pengelolaan Areal Pemakaman	108.325,0	215.525,0	-	-	900.000,0	106.542,0	212.201,0	-	-	813.000,0	98,35	98,46	-	-	90,33	-	-
Perencanaan Tata Ruang*	-	834.700,0	200.000,0	90.000,0	-	-	798.282,3	56.970,0	89.600,0	-	-	95,64	28,49	99,56	-	-	-
Pengendalian Pemanfaatan Ruang*	150.575,0	95.950,0	150.000,0	151.500,0	-	142.647,0	93.637,1	148.611,0	148.648,0	-	94,73	97,59	99,07	98,12	-	3,21	3,24
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan*	3.794.129,0	20.356.360,0	5.687.930,6	21.313.745,4	2.600.050,8	3.576.008,8	5.787.666,5	5.595.936,7	18.186.916,3	2.600.050,8	94,25	28,43	98,38	85,33	100,00	9,42	5,87
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	779.849,3	3.530.249,7	5.848.423,0	12.638.787,0	823.461,7	764.547,7	1.672.672,7	5.716.149,8	11.479.474,8	-	98,04	47,38	97,74	90,83	0,00	8,36	7,61
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga*	11.041.025,0	281.300,0	356.300,0	30.318.415,0	6.194.882,7	10.040.896,0	97.343,4	255.713,3	20.383.905,2	6.120.128,9	90,94	34,60	71,77	67,23	98,79	86,44	82,43
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000,0	15.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Pembinaan Lingkungan Sosial	-	-	-	2.792.784,0	1.000.000,0	-	-	-	2.753.232,0	580.868,0	-	-	-	98,58	58,09	-	-
Lingkungan Sehat Perumahan	-	50.000,0	90.000,0	35.309,5	31.450,0	-	-	-	-	29.444,0	-	-	-	-	93,62	-	-
Pengembangan Perumahan	300.200,0	2.219.155,0	2.961.000,0	1.175.872,9	861.190,0	-	-	-	-	781.544,8	-	-	-	-	90,75	-	-
Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	30.000,0	77.962,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	-	2.771.313,0	-	-	-	-	366.795,1	-	-	-	-	13,24	-	-
TOTAL	48.846.574,0	135.138.175	204.462.528	117.490.099	49.899.507	40.992.267,5	63.306.455,9	197.000.726,5	96.097.859,8	39.670.913,6	83,92	46,85	96,35	81,79	79,50	4,96	5,25

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, 2017

*) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

- a. Perkembangan Kota Batu yang pesat sebagaimana upaya perwujudan visi Walikota Batu untuk menjadikan Kota Batu sebagai kota yang mengedepankan kepariwisataan bertaraf internasional berimplikasi langsung kepada kebutuhan masyarakat pada fasilitas-fasilitas umum masyarakat dan atau wisatawan maupun sarana dan prasarana permukiman sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang mendukung perwujudan visi tersebut.
- b. Adanya target yang ditetapkan program nasional (*Universal Access*) maupun SPM urusan Pekerjaan Umum dan urusan Perumahan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, sarana prasarana permukiman dan penyehatan lingkungan permukiman. Hal ini bertentangan dengan kondisi potensi sumber daya yang semakin terbatas serta penurunan kualitas lingkungan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.
- c. Pada bidang perumahan, harga rumah yang semakin tidak terjangkau menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, sehingga perlu peran serta swasta sebagai mitra pemerintah dalam berinovasi/berperan dalam mewujudkan rumah layak huni yang terjangkau.

2. Peluang

- a. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan atau provinsi dalam pencapaian target layanan dalam urusan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, infrastruktur kota maupun kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat.
- b. Masih tersedianya sumber daya alam yang memungkinkan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana permukiman khususnya yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan permukiman (penyediaan air bersih, pelayanan sarana prasarana sanitasi).
- c. Dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyelenggarakan 2 (dua) urusan wajib pelayanan dasar dan 1 (satu) urusan pilihan pelayanan pertanahan dan pemakaman bersumber dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni, serta lingkungan kawasan permukiman yang sehat bagi setiap masyarakat Kota Batu. Permasalahan yang dihadapi menjadi tantangan agar dapat diselesaikan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun dasar-dasar permasalahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Bidang Cipta Karya

1. Kurangnya tenaga teknis yang memiliki sertifikat tentang bangunan gedung dan rumah negara;
2. Tidak adanya data base pendukung masalah tata bangunan baik bangunan gedung negara, bangunan perumahan/permukiman maupun data sarana prasarana lingkungan permukiman (air bersih, air limbah dan infrastruktur fisik lingkungan permukiman)
3. Masih belum matangnya sistem pengelolaan air bersih/air minum terutama di lingkungan masyarakat yang melibatkan HIPPAM;
4. Seringnya terjadi konflik antar desa/kelurahan berkaitan dengan penyaluran air bersih/air minum yang harus lintas wilayah;

5. Kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan seringkali membutuhkan proses yang lama.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Masih belum adanya kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pemenuhan penyediaan rumah layak huni yang dapat terjangkau masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
2. Besarnya kesenjangan kesediaan dengan kebutuhan akan rumah (*backlog*), baik backlog kepemilikan maupun backlog penghunian;
3. Terbatasnya kesediaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman.

3.1.3 Identifikasi Permasalahan Bidang Pertanahan dan Pemukiman

1. Masih belum jelasnya batasan kewenangan dalam pelayanan berkaitan dengan pertanahan, khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional;
2. Belum terpetakannya dengan jelas kondisi lahan yang telah tersertifikasi;
3. Pertumbuhan jumlah penduduk belum sebanding dengan penyediaan kebutuhan tanah makam dan pertumbuhan kawasan perumahan didaerah.

3.1.4 Identifikasi Permasalahan pada UPT. Pengelolaan Air Limbah Domestik

1. Akses terhadap sarana air limbah setempat yang memadai masih sangat rendah jika dilihat dari penggunaan tangki septic standart yang persentasenya masih kecil, mayoritas warga Kota Batu belum menggunakan tangki septic. Sarana pembuangan air limbah setempat umumnya masih menggunakan cubluk (belum memenuhi standart teknis yang ditetapkan);
2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik permukiman;
3. Minimnya jumlah personil teknis operasional UPT. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
4. Sarana dan Prasarana yang ada sekarang masih terbatas sehingga

- mengakibatkan sering terhambatnya pelayanan kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dan atau pelayanan sedot tinja pada masyarakat yang belum didukung oleh payung hukum/Perda;

Tabel 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Akses kebutuhan Perumahan yang layak	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan tentang perumahan belum banyak diketahui oleh masyarakat; - Harga tanah yang tidak terjangkau, terutama untuk Masyarakat berpenghasilan rendah; - Kebutuhan penyediaan rumah tidak sejalan dengan struktur penataan ruang untuk wilayah pengembangan permukiman; - Belum munculnya potensi pembiayaan perumahan dan investasi swasta pada bidang penyediaan perumahan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum adanya kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pemenuhan penyediaan rumah layak huni yang dapat terjangkau masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); - Besarnya kesenjangan kesediaan dengan kebutuhan akan rumah (backlog), baik backlog kepemilikan maupun backlog penghunian; - Terbatasnya kesediaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman (berkaitan dengan struktur Ruang Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah); - Pengawasan dan pengendalian bidang perumahan belum optimal.
2	Penyediaan infrastruktur Gedung dan Rumah Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya analisa kebutuhan pembangunan infrastruktur kota dan/atau kawasan permukiman termasuk data berkaitan dengan kondisi fisik setiap bangunan/gedung negara yang dikelola; - Belum terpetakannya bangunan gedung negara yang berada dalam lingkup bangunan yang dikelola satuan perangkat daerah; - Belum optimalnya pemberdayaan penyedia jasa konstruksi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga teknis yang memiliki sertifikat tentang bangunan gedung dan rumah negara sebagaimana peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Bangunan Gedung Negara; - Belum adanya data base pendukung masalah tata bangunan baik bangunan gedung negara, bangunan perumahan/permukiman; - Kualitas dan kapabilitas lembaga penyedia jasa konstruksi belum terpetakan dengan baik.
3	Penyediaan sarana prasarana lingkungan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya data terintegrasi dengan instansi lain berkaitan dengan akses masyarakat terhadap fasilitas/layanan air bersih dan sanitasi layak; - Belum adanya data penyediaan jalan lingkungan permukiman dan potensi pengembangan wilayah beserta sarana prasarananya; - Partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam penyediaan akses terutama akses sanitasi/air limbah masih belum optimal; - Fungsi IPLT dalam pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum matangnya sistem pengelolaan air bersih/air minum terutama di lingkungan masyarakat yang melibatkan HIPPAM; - Seringnya terjadi konflik antar desa/kelurahan berkaitan dengan penyaluran air bersih/air minum yang harus lintas wilayah; - Kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan pengelolaan air limbah dan kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan seringkali membutuhkan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		lumpur tinja belum optimal; - Peran pengusaha/swasta dalam penyelenggaraan/pengelolaan air limbah masih belum nampak.	proses yang lama; - Belum adanya peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah dan program layanan lumpur tinja terjadwal.
4	Pertanahan dan Pengelolaan Pemakaman	- Belum terpetakannya dengan jelas kondisi lahan yang telah tersertifikasi; - Belum terpetakannya data aset pertanahan; - Kebutuhan pemakaman belum dikelola dengan baik; - Belum optimalnya keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan areal makam.	- Masih belum jelasnya batasan kewenangan dalam pelayanan berkaitan dengan pertanahan, khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional; - Masih kurangnya kemauan dan kemampuan masyarakat dalam upaya sertifikasi tanah; - Pengelolaan data aset pertanahan belum optimal; - Kelayakan sarana dan prasarana areal pemakaman belum terpenuhi; - Pertumbuhan jumlah penduduk belum sebanding dengan penyediaan kebutuhan tanah makam dan pertumbuhan kawasan perumahan di daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

3.2.1 Visi

DESA BERDAYA KOTA BERJAYA, Terwujudnya Kota Batu sebagai sentra Agrowisata Internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera.

3.2.2 Misi

Misi 1 :

Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal.

Misi 2 :

Meningkatkan pembangunan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia.

Misi 3 :

Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis Agrowisata.

Misi 4 :

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Misi 5 :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.

3.2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam mendukung pelaksanaan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu dinas teknis yang menjalankan misi Walikota pada **Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan perdesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.**

Dalam melaksanakan misi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan tujuan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian desa dalam rangka mewujudkan Batu Kota Berkarakter dengan indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur, Indeks Desa Membangun dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam pencapaian tujuan ini, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong terhadap pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan faktor pendorong dan tantangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam hal pemenuhan kebutuhan infrastruktur kota/permukiman dan akses infrastruktur dasar (akses perumahan, sarana prasarana lingkungan permukiman);

2. Pembangunan berbasis kemandirian dan produktifitas desa/kelurahan akan menjadi faktor pendorong untuk pembangunan kawasan perdesaan dengan partisipasi aktif dari masyarakat desa/kelurahan.

Faktor Penghambat :

1. Tumpang tindihnya permasalahan penanganan pembangunan antara pemerintah kota dan pemerintah desa;
2. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung visi Kepala Daerah untuk sektor agrowisata belum diimbangi dengan kerjasama intensif antara satuan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian visi tersebut;
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pemahaman dalam pencapaian akses terhadap infrastruktur, terutama sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 - 2019

Berkaitan dengan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berhubungan dengan sektor/bidang Perumahan dan Ke-Cipta Karya-an. Hal ini berkaitan dengan beberapa prioritas/fokus pembangunan yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR yang harus dilaksanakan sejalan dengan program/kegiatan yang ada di wilayah provinsi maupun pemerintah daerah. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan 1** : Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan;
 - b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;
 - c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
2. **Tujuan 2** : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Sasaran :

- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi;
 - b. Meningkatnya ketahanan air.
3. **Tujuan 3** : Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

Sasaran :

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing;
 - b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
4. **Tujuan 4** : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"

Sasaran :

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
- c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

5. **Tujuan 5** : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran :

- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas;
- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Dengan melihat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Strategis tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkaitan dengan hampir semua tujuan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu pada tujuan 1, 2, 4, dan 5. Faktor penghambat dan pendorong terhadap pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Dukungan Program pemerintah pusat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan (*Universal Access*);
2. Dukungan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Faktor Penghambat :

1. Belum adanya data terintegrasi dengan instansi lain berkaitan dengan akses masyarakat terhadap fasilitas/infrastruktur layanan dasar;
2. Belum adanya analisa kebutuhan pembangunan infrastruktur kota dan/atau kawasan permukiman termasuk data berkaitan dengan kondisi fisik setiap bangunan/gedung negara yang dikelola;

3. Belum optimalnya pemberdayaan penyedia jasa konstruksi.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019

Berkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait erat dengan pembangunan bidang keciptakaryaan dan perumahan/kawasan permukiman. Renstra Dinas PU Provinsi menekankan pada tujuan yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan hunian tempat tinggal dan rumah yang layak huni bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Memenuhi hak dasar masyarakat atas air minum dan sanitasi yang layak;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
4. Meningkatkan kualitas pembangunan bangunan gedung Negara sesuai dengan persyaratan keandalan bangunan gedung;
5. Meningkatkan kualitas penyediaan sarana informasi dibidang pembangunan perumahan permukiman bagi pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.

Dengan melihat tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tersebut, faktor penghambat dan pendorong terhadap pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Dukungan pemerintah Provinsi dalam upaya pencapaian akses layanan dasar perumahan dan kawasan permukiman;
2. Dukungan kesediaan sarana informasi yang dapat membantu perolehan data pembangunan perumahan.

Faktor Penghambat :

1. Belum adanya data terintegrasi/pemetaan dengan indikator yang jelas berkaitan dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
2. Belum munculnya peran pelaku pembangunan perumahan pada pencapaian pembangunan perumahan di Kota Batu.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2010 – 2030

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2010 – 2030, disebutkan bahwa tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Batu adalah “Mewujudkan ruang Kota Batu yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai kota yang berbasis agropolitan dan kota pariwisata unggulan di Jawa Timur serta Kota Batu sebagai wilayah penopang hulu Sungai Brantas”.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Batu meliputi :

1. Pusat Kegiatan Sektor Perdagangan dan Jasa

Rencana pengembangan fasilitas perdagangan skala kota yakni :

- Pertokoan/Ruko Memusat di jalan lokal primer di Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas;
- Perdagangan modern (supermarket) Lokasinya bercampur dengan kegiatan pertokoan/ruko yang terdapat di pusat BWK;
- Komersial skala lokal merupakan jenis kegiatan perdagangan berupa ruko dan pertokoan serta pasar tradisional yang dikembangkan pada setiap pusat BWK, yakni terdapat di Desa Junrejo, Kelurahan Tulungrejo dan Desa Oro-oro Ombo, serta Desa Pandanrejo dan Desa Torongrejo.

2. Pusat Kegiatan Sektor Perkantoran

Kegiatan sektor perkantoran yang terdapat di Kota Batu memiliki pola menyebar di setiap wilayah di Kota Batu. Pembagian kegiatan perkantoran yang terdapat dan direncanakan di Kota Batu meliputi :

- Perkantoran Pemerintahan

Rencana pengembangan kegiatan sektor perkantoran pemerintahan di Kota Batu meliputi pengembangan kawasan perkantoran di Jalan Diponegoro Kelurahan Sisir, Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Ngaglik, Jalan Kartika dan Sultan Agung di Kelurahan Sisir, Jalan Bukit Berbunga Desa Sidomulyo, Jalan Hasanudin Desa Junrejo, dan arahan pengembangan perkantoran di Jalan Panglima Sudirman dekat Kantor Walikota. Pemusatan perkantoran di kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kota Batu terdapat di Jalan Raya Pendem

Desa Pendem. Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada yakni pusat pendidikan Arhanud.

– Perkantoran Swasta

Rencana Pengembangan kegiatan sektor perkantoran swasta tersebar di wilayah Kota Batu meliputi Jalan Diponegoro Kelurahan Sisir dan Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Ngaglik.

3. Pusat Kegiatan Sektor Perumahan

Kegiatan pengembangan sektor perumahan yang terdapat di Kota Batu berdasarkan karakteristik dan fungsi pengembangan perumahan yang ada di Kota Batu. Pembagian kegiatan perumahan yang terdapat dan direncanakan di Kota Batu meliputi :

– Perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota;

Kawasan perumahan pusat kota merupakan kawasan perumahan perkotaan dengan pola kegiatan perekonomian yang dominan adalah sektor perdagangan modern, sektor pariwisata modern, serta tersedia pusat pelayanan pemerintahan dan fasilitas pelayanan umum skala kota. Perumahan kawasan pusat kota merupakan perumahan padat serta memiliki kelengkapan fasilitas dan utilitas. Kawasan perumahan pusat kota direncanakan meliputi Desa Pendem, Desa Dadaprejo, Desa Mojorejo, Desa Beji, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, Desa Pesanggrahan dan Desa Songgokerto.

– Perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan real estate dan perumahan wisata;

a. Perumahan real estate

Kawasan perumahan real estate merupakan kawasan perumahan yang dikembangkan oleh developer dalam memenuhi kebutuhan perumahan penduduk di wilayah Kota Batu.

Pengembangan kawasan perumahan real estate di wilayah Kota Batu terdapat di Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, Desa Songgokerto, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo, Desa Dadaprejo, Desa Pandanrejo, dan Kelurahan Sisir.

b. Perumahan Wisata

Kawasan perumahan wisata, merupakan kawasan perumahan yang dikembangkan dalam mendukung kegiatan wisata yang juga menyediakan villa sebagai penginapan bagi para wisatawan.

Kawasan perumahan wisata di wilayah Kota Batu terdapat di Desa Punten, Tulungrejo, dan Bumiaji untuk wisata *living with people*, dan di Desa Songgokerto, dan Desa Oro-oro Ombo untuk pemusatan penyediaan villa bagi para wisatawan.

- Perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan agropolis; Kawasan perumahan agropolis merupakan kawasan perumahan perdesaan dengan pola kegiatan perekonomian yang dominan adalah sektor pertanian dan merupakan kawasan produksi pertanian. Kawasan perumahan agropolis pada kawasan perdesaan pertanian merupakan perumahan yang menyebar di sekitar daerah pertanian (*farm village type*).

Pengembangan perumahan agropolis untuk mendukung kegiatan wisata *living with people* di kawasan agropolitan. Perumahan kawasan agropolis direncanakan mandiri. Kawasan perumahan agropolis direncanakan meliputi Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Punten, Desa Gunungsari, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Sidomulyo, dan Desa Sumberejo Kecamatan Bumiaji. Maka kawasan perdesaan pertanian direncanakan memiliki pusat perumahan perdesaan dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan tingkat desa dan lingkungan, pengembangan perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan yang setara dengan puskesmas pembantu.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Batu, khususnya berkaitan dengan rencana pengelolaan kawasan peruntukan perumahan antara lain meliputi :

1. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
2. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura;
3. Permukiman pusat kota diarahkan dalam penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
4. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
5. Pengembangan permukiman pusat kota dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan; dan
6. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, dalam Perencanaan Strategis juga dibutuhkan pengkajian pengaruh kebijakan/rencana program terhadap lingkungan hidup. Dalam Pokok-pokok KLHS RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022 telah ditentukan tema besar dan isu dan/atau permasalahan yang ditelaah secara komprehensif yang menyertakan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Tema besar dan isu-isu pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022 teridentifikasi antara lain :

1. Stabilitas Sosial dan Politik;
2. Kemiskinan;
3. Pembangunan SDM;
4. Pertanian;
5. Ketahanan Pangan;
6. Kewirausahaan dan Usaha Kecil;
7. Pariwisata;
8. Kawasan Perkotaan dan Permukiman;
9. Manajemen Sumber Daya Air;
10. Green Investment;
11. Pengelolaan Sampah & Lingkungan Hidup;
12. Manajemen Bencana.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan program berada pada tema ke (8) Kawasan Perkotaan dan Permukiman dengan Isu Strategis terpilih yaitu "Peningkatan Rumah Layak Huni bersanitasi di Kota Batu". Hal ini sejalan/selaras dengan program nasional *Universal Access* 100 – 0 – 100 yang menjadi target capaian Pemerintah Pusat sekaligus target capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pemerintah Daerah. Rumusan alternatif dan rekomendasi Program Pembangunan terpilih khususnya pada tema yang menjadi tugas kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8 Perumusan Alternatif dan Rekomendasi Program Pembangunan

No	Program	Alternatif Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Rekomendasi Mutu Rancangan/Materi Program/Regulasi
1	2	3	4
1	Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian perubahan pemanfaatan lahan (khususnya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan) - Penyediaan sarana prasarana pemukiman baru (khususnya distribusi air bersih, sanitasi dan pembuangan sampah domestik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kajian luasan permukiman padat penduduk - Penyusunan regulasi mengenai pengendalian lingkungan di sekitar wilayah permukiman padat

No	Program	Alternatif Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Rekomendasi Mutu Rancangan/Materi Program/Regulasi
1	2	3	4
		- Pengendalian pembangunan perumahan baru melalui sistem perijinan untuk menanggulangi dibangunnya perumahan di daerah rawan bencana.	penduduk
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	- Peningkatan Standar Pengujian Limbah industri - Sosialisasi pengelolaan limbah oleh industri maupun masyarakat umum	- Penyusunan regulasi mengenai sistem air limbah - Mencapai akses sanitasi yang bersih dan baik;
3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	- Pengembangan regulasi terkait pembangunan - Penerapan kegiatan AMDAL dalam setiap tahap pengembangan - Pengendalian dan pengawasan terhadap daerah strategis.	- Identifikasi kajian potensi daerah - Penyusunan regulasi mengenai pengawasan dan pengendalian wilayah
4	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	- Pengembangan infrastruktur pedesaan yang ramah lingkungan - Program agrowisata menjadi ciri pembangunan di pedesaan	- Identifikasi kajian potensi daerah - Identifikasi kajian pengembangan agrowisata - Regulasi pengendalian dan pengawasan pembangunan infrastruktur pedesaan

Sumber : Ringkasan KLHS RPJMD Kota Batu 2018 – 2022, 2018

Rumusan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu pendekatan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tema besar yang dibagi sesuai peran setiap perangkat daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah dilakukan review pada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan berdasarkan telaahan yang dilakukan, dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani selama tahun 2017-2022. Penyelesaian masalah disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Isu strategis yang terbagi pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

3.5.1 Isu Strategis Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Percepatan Backlog perumahan baik penghunian maupun kepemilikan yang cukup tinggi;

2. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan kawasan permukiman;
3. Belum tercapainya capaian program pemerintah (*Universal Access*) 100-0-100 yaitu 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi

3.5.2 Isu Strategis Bidang Cipta Karya

1. Pentingnya kebutuhan Peraturan Daerah Bangunan Gedung untuk menyusun bahan kebijakan teknis bidang penataan bangunan di Kota Batu;
2. Perubahan/Pergeseran pola tata ruang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana untuk mengimbangi rencana pengembangan infrastruktur permukiman.

3.5.3 Isu Strategis Bidang Pertanahan dan Pemakaman

1. Penyediaan kebutuhan tanah makam seiring pertumbuhan kawasan perumahan di daerah;
2. Dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan BPN dalam percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL (Pendataan Tanah Sistematis Lengkap).

3.5.4 Isu Strategis Pelayanan UPT. Pengelolaan Air Limbah Domestik

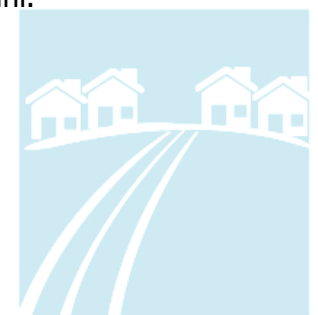
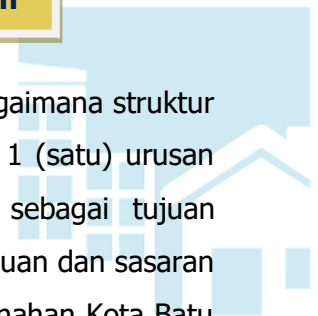
1. Akses terhadap sarana air limbah setempat yang memadai masih sangat rendah jika dilihat dari penggunaan tangki septic standart yang persentasenya masih kecil, mayoritas warga Kota Batu belum menggunakan tangki septic. Sarana pembuangan air limbah setempat umumnya masih menggunakan cubluk (belum memenuhi standart teknis yang ditetapkan);
2. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana struktur organisasi yang ditetapkan, melaksanakan 2 (dua) urusan wajib dan 1 (satu) urusan pilihan. Pelaksanaan urusan tersebut mempunyai tujuan utama sebagai tujuan perangkat daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu beserta indikator kinerja disajikan dalam Tabel 8 sebagaimana berikut ini.



Tabel 9 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak		Indeks kualitas infrastruktur lingkungan permukiman	85	85	85	85	85	
			a. Meningkatkan akses perumahan untuk masyarakat	a.1. Cakupan ketersediaan Rumah layak huni	99,11	99,12	99,13	99,14	99,15
				a.2. Persentase penduduk berakses air bersih/air minum	84,49	86,98	89,47	91,96	94,45
				a.3. Persentase Rumah tinggal bersanitasi	86,96	90,16	93,33	96,51	99,65
				a.4. Persentase Jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
			b. Meningkatkan infrastruktur kota dan kawasan permukiman yang layak	b.1. Presentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
			c. Meningkatkan penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman	c.1. Persentase fasilitasi sertifikasi tanah	100	100	100	100	100
				c.2. Persentase tempat pemakaman dengan sarana prasarana yang layak	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, aktual dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sedangkan arah kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam lima tahun mendatang, rumusan Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkaitan dengan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 10 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Desa Berdaya Kota Berjaya,			
Visi	Terwujudnya Kota Batu sebagai sentra Agro Wisata Internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera		
Misi 4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Meningkatnya akses perumahan untuk masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, pengembangan dan sosialisasi standar dan regulasi bidang perumahan; 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pelaksana kebijakan serta penyelenggara perumahan; 3. Pengintegrasian, peningkatan dan pengembangan kawasan perumahan dengan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan tata ruang; 4. Peningkatan penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pemenuhan kebutuhan perumahan akibat dampak bencana alam; 5. Pengintegrasian pembiayaan perumahan dan permukiman dengan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang termasuk pengembangan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman peraturan perundangan di bidang perumahan; 2. Meningkatnya koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan; 3. Meningkatnya penataan kawasan perumahan dan permukiman; 4. Meningkatnya penyediaan rumah, prasarana dan sarana perumahan dan permukiman swadaya; 5. Mengembangkan sistem pembiayaan atau bantuan stimulan untuk perumahan formal dan swadaya.
	Meningkatnya infrastruktur kota dan kawasan permukiman yang layak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan analisa kebutuhan pembangunan infrastruktur kota dan/atau kawasan permukiman yang dikelola oleh perangkat daerah; 2. Pengembangan/pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data base pendukung tata bangunan baik bangunan gedung negara, rumah negara dan bangunan di kawasan permukiman; 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas

Visi	Desa Berdaya Kota Berjaya, Terwujudnya Kota Batu sebagai sentra Agro Wisata Internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera		
Misi 4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		infrastruktur kota dan kawasan permukiman di wilayah strategis dan cepat tumbuh; 3. Optimalisasi pemberdayaan penyedia jasa konstruksi.	bangunan gedung negara, rumah dinas dan bangunan pelayanan publik yang memenuhi persyaratan teknis sesuai perundang-undangan; 3. Meningkatnya kualitas dan kapabilitas kelembagaan penyedia jasa konstruksi.
		4. Penyusunan, pengembangan dan sosialisasi peraturan perundangan tentang pengelolaan air bersih dan sanitasi; 5. Pengintegrasian data akses masyarakat terhadap fasilitas layanan sarana prasarana lingkungan permukiman dengan potensi pengembangan wilayahnya; 6. Optimalisasi penyediaan/ pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman 7. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan pihak swasta/dunia usaha dalam pengelolaan maupun penyediaan akses sarana prasarana lingkungan permukiman terutama akses air bersih, sanitasi dan jalan lingkungan di lingkungan pedesaan; 8. Peningkatan pembinaan lingkungan sosial yang berkualitas; 9. Optimalisasi pelayanan pengolahan lumpur tinja dan fungsi IPLT.	4. Mengembangkan dan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi tentang pengelolaan air bersih dan sanitasi; 5. Meningkatnya pengintegrasian data akses masyarakat terhadap fasilitas layanan sarana prasarana lingkungan permukiman; 6. Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan akses sarana prasarana lingkungan permukiman (air bersih, sanitasi dan jalan lingkungan); 7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan maupun penyediaan akses sarana prasarana lingkungan permukiman terutama akses air bersih, air limbah dan jalan lingkungan di lingkungan pedesaan; 8. Meningkatnya volume pemeliharaan jalan lingkungan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih; 9. Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan limbah domestik dan operasional IPLT.
	Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman	1. Peningkatan jumlah bidang tanah yang bersertifikat; 2. Pengembangan/ Pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi untuk data aset pertanahan 3. Peningkatan penanganan prasarana pemakaman; 4. Peningkatan keterlibatan stakeholder bidang pemakaman.	1. a. Fasilitasi dan stimulasi proses pendaftaran tanah bagi masyarakat miskin dan UMKM; 1. b. Percepatan proses pendaftaran tanah untuk masyarakat; 2. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengelolaan data base aset tanah; 3. Meningkatnya alokasi anggaran untuk pembangunan/pemeliharaan prasarana pemakaman 4. Fasilitasi insentif kepada pengelola pemakaman.

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sementara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2022 terbagi untuk masing-masing bidang sebagai berikut :

6.1 Program Sekretariat

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
 - f. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - g. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - h. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga;
 - i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor;
 - k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
 - l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
 - m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor;
 - c. Kegiatan Pengadaan Meubeleur;
 - d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - a. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 - b. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja.

Setelah adanya evaluasi berkaitan dengan capaian kinerja pada awal tahun 2018, tahun 2019 dan selanjutnya rencana program dan kegiatan Sekretariat menjadi :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan Daerah;
 - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah;
 - d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - e. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah.

6.2 Program Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan;
 - a. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Nomor Rumah;
 - b. Kegiatan Pembangunan/Penyediaan perumahan swadaya/formal;
 - c. Kegiatan Validasi Rumah Tidak Layak Huni.

Setelah adanya evaluasi berkaitan dengan capaian kinerja pada awal tahun 2018, tahun 2019 dan selanjutnya rencana program dan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman menjadi :

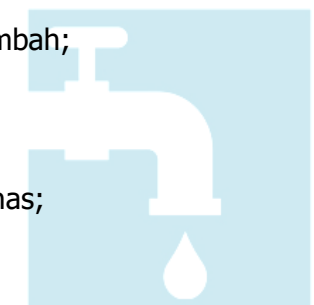
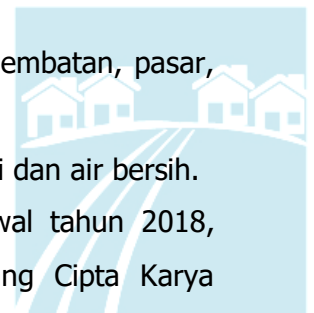
1. Program Pengembangan, Pengelolaan Perumahan dan Permukiman;
 - a. Kegiatan Pembangunan/penyediaan perumahan swadaya/formal;
 - b. Kegiatan Pendataan dan Pemasangan nomor Rumah dan Bangunan;

6.3 Program Bidang Cipta Karya

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh;
 - a. Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur;
 - b. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
 - c. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas;
 - d. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
 - a. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah;
 - b. Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air limbah;
 - c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah.
3. Program Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pedesaan;
 - a. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Pedesaan;
 - b. Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan.
4. Program pembinaan Lingkungan Sosial;
 - a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan/jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata;
 - b. Kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih.

Setelah adanya evaluasi berkaitan dengan capaian kinerja pada awal tahun 2018, tahun 2019 dan selanjutnya rencana program dan kegiatan Bidang Cipta Karya menjadi :

1. Program Penataan dan Pengendalian Bangunan;
 - a. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Pedesaan;
 - b. Kegiatan Pembangunan Jalan, Drainase dan Plengsengan Lingkungan Permukiman;
 - c. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi;
 - d. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah;
 - e. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah;
 - f. Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur;
 - g. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas;
 - h. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas;
 - i. Kegiatan Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi.



2. Program pembinaan Lingkungan Sosial;
 - a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan/jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata;
 - b. Kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih.

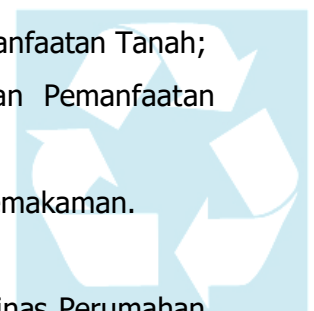
6.4 Program Bidang Pertanahan dan Pemakaman

1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - a. Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan;
 - c. Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan dan Administrasi Pertanahan;
 - d. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal;
2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
 - a. Kegiatan pengumpulan dan Analisis Database Jumlah Jiwa yang Meninggal;
 - b. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman Beretribusi;
 - c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
 - e. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Setelah adanya evaluasi berkaitan dengan capaian kinerja pada awal tahun 2018, tahun 2019 dan selanjutnya rencana program dan kegiatan Bidang Pertanahan dan Pemakaman menjadi :

1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - a. Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - b. Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Rincian rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tertuang pada Tabel 11.



Tabel 11 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)				
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Meningkatnya akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak				Indeks Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	0,69	0,76	41.890	0,79	95.704	0,82	187.840	0,86	176.044	0,89	178.006	0,89	679.475	DPKPP	Kota Batu		
	Meningkatnya akses perumahan untuk masyarakat		Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan Rumah layak huni	80,16	80,41	1.404												Bid. Perumahan		
				Pengadaan dan Pemasangan Penomoran Rumah	Jumlah nomor rumah dan bangunan terpasang	14.600 nomor	13.000	1.317													
				Pembangunan/ Penyediaan perumahan swadaya/formal	Jumlah Rumah Layak huni terbangun	8 unit Rumah LVRI	1 dok Redesign	50													
				Validasi Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak huni yang tervalidasi	100%	100%	37													
				Pengembangan, Pengelolaan Perumahan dan Permukiman	Cakupan ketersediaan Rumah layak huni				80,76	32.060	81,11	31.980	81,45	27.860	81,79	27.860	81,79	277.102	Bid. Perumahan		
				Pendataan dan Pemasangan Penomoran Rumah	Jumlah nomor rumah dan bangunan terdata dan terpasang				1.000	100	200	20	200	20	200	20	14.600	1.477			
				Pembangunan/ Penyediaan perumahan swadaya/formal	Jumlah Rumah Layak huni terbangun				200 Rmh PNS, 8 Rmh LVRI	31.930	200 Rmh PNS, 8 Rmh LVRI	31.930	200 Rmh PNS	27.810	200 Rmh PNS	27.810	824	119.530			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang terpelihara	0,00	15,00	2.019	30,00	2.300	45,00	2.400	60,00	2.450	75,00	2.450	75,00	11.619			
			Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, dan sarana/prasarana pendukung pariwisata	Jumlah panjang ruas jalan lingkungan terpelihara		1.090 m	728	1.100	800	1.100	800	1.150	850	1.150	850	5.590	4.028			
			Penyediaan/Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	Jumlah IPAL Komunal dan Jaringan Air Bersih terpelihara		2 IPAL, 2 pek PAB	1.291	2 IPAL, 2 pek PAB	1.500	2 IPAL, 2 pek PAB	1.500	2 IPAL, 2 pek PAB	1.600	2 IPAL, 2 pek PAB	1.600	10 IPAL, 10 pek PAB	7.591			
Meningkatnya infrastruktur kota dan kawasan permukiman yang layak			Penataan dan Pengendalian Bangunan	Presentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis	80,00	84,00	10.214	86,00	27.958	88,00	120.592	90,00	112.700	90,00	114.950	90,00	386.464	Bidang Cipta Karya		
			Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik	80,00	84,00	10.214											Bidang Cipta Karya		
			Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dan berfungsi dengan baik		5	8.077	3 (Pasar sayur tahap III, Gelora Arjuna, Lap. OR Kel. Songgokerto)	18.477	3 (Pasar Besar, Pasar Indragiri, gedung kelembagaan Kel. Sisir)	107.000	1 Pasar besar Kota Batu (lanjutan)	104.000	1 Pasar besar Kota Batu (lanjutan)	104.000	11	341.554			
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor terbangun		4	809													
			Pembangunan Gedung	Jumlah gedung kantor/Rumah Dinas				1 Gedung Damkar/	4.450	1 (Kantor Kec.	11.642	2 (Gudang	7.000	2	8.500	10	32.401			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kantor/Rumah Dinas	terbangun				Hanggar Tahap II		Bumiaji)		aset, Perpustakaan Kota)							
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah Rumah dinas di rehab		2 rumah dinas	820												
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor direhab		3	508												
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor/rumah dinas direhab				2 rumah dinas, 2 Gedung Kel. Temas, Gedung Kel. Ngaglik	4.931	2 rumah dinas, 2 (Gedung PU lama, Gedung Arsip)	1.800	2 rumah dinas, 4 gedung kantor	1.500	2 rumah dinas, 5 gedung kantor	2.250	10 rumah dinas, 16 gedung kantor	11.809		
			Pemberdayaan Penyedia Jasa konstruksi	Jumlah Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				50	100	100	150	150	200	200	200	200	725		
				Persentase Penduduk berakses air bersih/air minum	82,00	84,49	2.839	86,98	7.750	89,47	7.750	91,96	7.750	94,45	7.750	94,45	33.839		
			Program pembangunan/ Peningkatan infrastruktur pedesaan	Persentase Penduduk berakses air bersih/air minum	82,00	84,49	14.217												
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Jumlah Bangunan Tandon/ Bronchaptering, Jaringan Transmisi/		11 pek	2.839	17 pek	7.750	17 pek	7.750	17 pek	7.750	17 pek	7.750	79 pek	33.839		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Distribusi dan Meterisasi															
				Persentase Jalan Lingkungan permukiman dalam kondisi baik	60,00	80,00	11.378	86,98	3.000	89,47	3.000	91,96	3.000	94,45	3.000	94,45	20.381		
			Pembangunan jalan dan Jembatan Pedesaan	Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun	85.328	28.442	11.378												
			Pembangunan jalan, drainase, dan plengsengan lingkungan permukiman	Panjang Jalan, drainase dan plengsengan Lingkungan permukiman yang terbangun				7.110	3.000	7.110	3.000	7.110	3.000	7.110	3.000	142.210	20.381		
				Persentase rumah tinggal bersanitasi	85,16	86,96	6.744	90,16	15.850	93,33	15.608	96,51	15.724	99,65	15.436	99,65	67.582		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	85,16	86,96	6.744												
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah IPAL komunal terbangun	43 IPAL	13 IPAL	5.778												
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi	Jumlah IPAL komunal dan TPS 3R terbangun				18 IPAL	14.900	17 IPAL	14.650	17 IPAL	14.766	16 IPAL	14.478	124 IPAL	64.572		
			Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah	Jumlah peserta sosialisasi program sanitasi/air limbah		150 Peserta	58												
			Sosialisasi dan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air	Jumlah peserta sosialisasi program				150 Peserta	58	150 Peserta	58	150 Peserta	58	150 Peserta	58	750 Peserta	290		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Limbah	sanitasi/air limbah															
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah rumah/bangunan terdata dan terlayani sedot tinja	4000 rumah terdata, 76 rumah/bangunan terlayani	4000 rumah terdata, 100 rumah/bangunan terlayani	908	4000 rumah terdata, 125 rumah/bangunan terlayani	900	4000 rumah terdata, 150 rumah/bangunan terlayani	900	4000 rumah terdata, 200 rumah/bangunan terlayani	900	4000 rumah terdata, 200 rumah/bangunan terlayani	900	20.000 rumah terdata, 851 rumah/bangunan terlayani	4.508		
	Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman		Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase fasilitasi sertifikasi tanah	0,00	1,00	2.368	1,03	637	1,06	652	1,09	652	2,10	616	2,10	4.925	Bidang Pertanahan dan Pemakaman	
			Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah bidang tanah terfasilitasi sertifikasi		1.374 bidang, 10 bidang aset pemkot	2.220												
			Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	jumlah kasus sengketa tanah tertangani		1	32												
			Bimbingan teknis peraturan dan administrasi pertanahan	Jumlah peserta bimbingan teknis		0	0												
			Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	Jumlah database aset tanah Kota Batu		1	107												
			Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	Jumlah bidang tanah terfasilitasi sertifikasi				60 bidang aset pemkot,	637	60 bidang aset pemkot, 200	652	60 bidang aset pemkot,	652	30 bidang aset pemkot,	616	2.394 bidang	4.925		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pemanfaatan Tanah					200 bidang		bidang		200 bidang		200 bidang					
			Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak	0,00	10,00	2.878	20,00	3.635	30,00	3.637	40,00	3.589	50,00	3.594	50,00	17.333		Bidang Pertanahan dan Pemakaman
			Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak	0,00	10,00	2.878												
			Pengumpulan dan analisis database jumlah jiwa yang meninggal	jumlah inventarisasi data makam beratribusi		1 TPU	50												
			Koordinasi pengelolaan areal pemakaman beratribusi	Jumlah masyarakat terlayani pengelolaan makam beratribusi		2500	44												
			Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana prasarana pemakaman terbangun		10	1.929												
			Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah pemakaman yang terpelihara / dalam kondisi baik		93	840												
			Monitoring evaluasi dan pelaporan	Persentase pelaksanaan money makam beratribusi		100%	15												
			Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana prasarana pemakaman terbangun dan				10	3.635	10	3.637	10	3.589	10	3.594	50	17.333		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pemakaman	terpelihara															
PROGRAM RUTIN/PENDUKUNG KINERJA																			
			<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran</i>		100%	1.396												Sekretariat
			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Biaya Jasa komunikasi dan listrik yang terbayar		12 bln,8 Pasang baru PDAM	95												
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional	Jumlah servis kendaraan pajak kendaraan dan jasa KIR		18 R2, 4 R4, 2 R6	40												
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor pengelola keuangan, kegiatan dan honorarium/gaji non PNS		12 bln	850												
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honor petugas kebersihan kantor		12 bln	55												
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		12 bln	80												
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang Cetakan dan Penggandaan dokumen		12 bln	45												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis Peralatan rumah tangga yang disediakan		12 bln	17												
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan Berlangganan yang sudah dibayar		12 bln	5												
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan		12 bln	45												
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		12 bln	19												
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan luar daerah		12 bln	120												
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah		12 bln	25												
			Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkat dan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			535												Sekretariat
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan		0	-												
			Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang disediakan		0	-												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional dan jabatan yang terpelihara		18 R2, 4 R4, 2 R6	450													
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kerja/operasional kantor yang terpelihara		30 PC, 11 Laptop, 39 Printer, 2 Mesin FC dan 1 plotter	85													
			Peningkatan Disiplin Aparatur	meningkatnya kedisiplinan aparatur melalui keseragaman atribut atau pakaian		80 Stel	30													Sekretariat
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu aparatur																
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian olah raga dan atau pakaian kerja lapangan aparatur		80 stel	30													
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kualitas dan kapabilitas aparatur		15 orang	75													Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah uang saku dan kontribusi peserta Diklat		15 orang	75												
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah		4 Laporan	10												Sekretariat
			Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan yang disajikan		4 Laporan	10												
			Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi dan operasional perkantoran		100%	2.046	100%	4.139	100%	2.276	100%	2.374	100%	2.430	100%	13.265		Sekretariat
			Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, anggaran, dan Laporan tersusun				14 Dokumen	15	14 Dokumen	15	14 Dokumen	15	14 Dokumen	20	60 Dokumen	75		
			Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Keuangan tersusun				1 Dokumen	5	1 Dokumen	5	1 Dokumen	5	1 Dokumen	5	4 Dokumen	20		
			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah jasa kantor dan barang pakai habis tersedia				Penyediaan barang pakai habis dan jasa kantor selama 12	1.534	Penyediaan barang pakai habis dan jasa kantor	1.541	Penyediaan barang pakai habis dan jasa kantor	1.559	Penyediaan barang pakai habis dan jasa kantor	1.620	Penyediaan barang pakai habis dan jasa kantor	7.650		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								bulan		selama 12 bulan		selama 12 bulan		selama 12 bulan		selama 12 bulan			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti capacity building dan atau diklat (teknis dan fungsional)				53 orang	85	15 orang	75	15 orang	80	15 orang	80	75	395		
			Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan dinas terpelihara, dan Jumlah Sarana dan prasarana peralatan perlengkapan kantor tersedia dan terpelihara				26 kendaraan : 5 unit tersedia, 18 R2, 1 R4 jabatan 2truk terpelihara & 100% peralatan perlengkapan tersedia (10 printer, 8PC, 1 papan elektronik, 7 lemari, 7 WS, 16kursi) dan terpelihara	2,500	18 R2, 6 R4 jabatan 2truk terpelihara & 100% peralatan perlengkapan tersedia (5 lemari, 10 kursi) dan terpelihara	640	18 R2, 6 R4 jabatan 2truk terpelihara & 100% peralatan perlengkapan tersedia (5 printer, 5 laptop, 6 lemari) dan terpelihara	715	18 R2, 6 R4 jabatan 2truk terpelihara & 100% peralatan perlengkapan tersedia (5 printer, 5 PC, 20 kursi) dan terpelihara	710	Sarana prasarana kantor tersedia dan terpelihara	5,100		

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2017-2022 pada Misi 4 - **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan** adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 12 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kualitas Infrastruktur permukiman	69	76	79	82	86	89	89
1	Cakupan ketersediaan Rumah layak huni	99,08	99,11	99,12	99,13	99,14	99,15	99,15
2	Persentase penduduk berakses air bersih/air minum	82,00	84,49	86,98	89,47	91,96	94,45	94,45
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	85,16	86,96	90,16	93,33	96,51	99,65	99,65
4	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	60,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
5	Persentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis	80,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	90,00
4	Persentase fasilitasi sertifikasi tanah	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase tempat pemakaman dengan sarana prasarana layak	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00

BAB 8

PENUTUP

Dari uraian permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan serta program/kegiatan dalam rangka pembangunan pada bidang perumahan dan permukiman, ke-cipta karya dan pertanahan dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan capaian sesuai target nasional (pencapaian program nasional) dan target daerah (pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih) yang diharapkan memerlukan upaya pihak internal dan eksternal yang cukup besar.

Capaian pelayanan berupa backlog perumahan, penyediaan rumah layak huni, layanan akses air minum, air limbah, jalan lingkungan, pembangunan dan penataan bangunan gedung dan fasilitas kawasan permukiman, serta layanan pertanahan dan pemakaman merupakan tugas pelayanan yang langsung bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian sampai tahun 2022 juga diperlukan dana yang besar, sedangkan kemampuan daerah (APBD) masih sangat terbatas, sehingga dukungan pendanaan dari APBD Provinsi maupun APBN masih sangat dimungkinkan dapat membantu pencapaian target layanan.

Penyelesaian permasalahan pekerjaan umum (cipta karya), perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan dan pemakaman tentunya tidak hanya bisa diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur semata, namun perlu dukungan dan partisipasi masyarakat, pelaku usaha maupun pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pencapaian akses maupun pemeliharaan berkesinambungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat terus berkelanjutan.

Untuk selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu 2017-2022 ini merupakan landasan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kota Batu. Dengan adanya dinamika/perubahan kondisi yang mungkin terjadi di masyarakat, maka akan diperlukan review berkala terhadap target capaian yang ditentukan.